

7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)

-Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir. Mohammad Natsir merupakan Perdana Menteri yang berperan aktif dalam menyatukan banyak partai dalam parlemen. Meskipun begitu, terdapat partai politik yang berseberangan seperti PNI yang tidak berhasil ia rangkul. PNI bahkan memberikan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Natsir, oleh karena sebagian besar parlemen berpihak pada PNI, Natsir memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.



2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

-Kabinet selanjutnya adalah Sukiman yang berasal dari Masyumi. Masalah yang dihadapi pada kabinet ini kurang lebih sama dengan kabinet sebelumnya, yaitu PNI yang menentang beberapa kebijakan. Akhirnya kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI. Kabinet Sukiman pun akhirnya berakhir pada 23 Februari 1952.



3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

-Kabinet Wilopo beranggotakan para pakar yang ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, kabinet ini sering disebut dengan Zaken Kabinet. Tugas pokok Wilopo adalah menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Namun, Kabinet Wilopo bubar sebelum Pemilu berhasil dilaksanakan.



4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955)

-Kabinet Ali Sastroamidjojo I sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.



5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

-Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet yang saat itu berhasil melaksanakan Pemilu 1955. Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Ia memimpin kabinet yang memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Ia turut serta dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) antara 1958 sampai 1961.



6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

-Dari hasil pemilu 1955, Ali Sastromijoyo kembali dipercaya menjadi Perdana Menteri. Partai yang ia pimpin, yaitu PNI mendapat suara terbanyak. Namun, Ali Sastroamijoyo terpaksa harus menyerahkan kembali mandatnya pada presiden.



7. Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959)

-Kabinet terakhir adalah Kabinet Juanda. Ada lima program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, namun permasalahan muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya.

